

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari (IAI, 2018):

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas

mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.

Dalam rangka mencapai tujuannya, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi (IAI, 2018):

- a. Aset;
- b. Liabilitas;
- c. Ekuitas;
- d. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
- e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
- f. Arus kas

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan.

Menurut Weygandt, *et al.* (2019), ada 2 pengguna informasi keuangan:

1. *Internal Users* (Pengguna Internal): Pengguna internal dari informasi akuntansi adalah manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis, termasuk manajer pemasaran, supervisor produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan.
2. *External Users* (Pengguna Eksternal): Pengguna eksternal adalah individu dan organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan tersebut. Dua jenis pengguna eksternal yang paling umum adalah investor dan kreditur. Investor menggunakan informasi akuntansi dalam

membuat keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual saham suatu perusahaan. Sedangkan, kreditur menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau pemberian pinjaman uang.

## **2.2 Audit**

Arens (2017) menyatakan bahwa *auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Peraturan menteri keuangan No. 17/PMK.01/2008 menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan oleh akuntan publik adalah melakukan audit atau pemeriksaan terhadap laporan keuangan, perpajakan dan konsultasi manajemen.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 200 tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Sebagai basis untuk opini auditor, SA mengharuskan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2017).

Menurut Agoes (2017), berdasarkan luas pemeriksaannya, audit dibedakan menjadi:

### 1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau *International Standard on Auditing (ISA)* atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, serta Standar Pengendalian Mutu.

### 2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Menurut Arens (2017) akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit, yaitu:

#### 1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Contoh dari audit operasional adalah mengevaluasi apakah pemrosesan gaji yang terkomputerisasi untuk anak perusahaan telah beroperasi secara efisien dan efektif.

## 2. Audit Ketaatan (*Compliance audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Contoh dari audit ketaatan adalah menentukan apakah persyaratan bank untuk perpanjangan pinjaman telah dipenuhi.

## 3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Contoh dari audit laporan keuangan adalah audit tahunan atas laporan keuangan.

Auditor perlu melakukan tahapan-tahapan yang tepat selama melakukan audit, agar tujuan audit dapat dicapai. Menurut Arens, *et al.* (2017), terdapat empat tahapan dalam proses melakukan proses audit, yaitu:

### 1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit

Pada tahap perencanaan dan perancangan pendekatan audit, auditor menerima klien, memahami bisnis klien dan lingkungannya, memahami *internal control* perusahaan dan menilai risiko pengendalian, menilai risiko salah saji material, dan menentukan strategi audit serta rencana audit secara menyeluruh.

### 2. Melaksanakan uji pengendalian dan keterjadian transaksi

Pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Prosedur untuk menguji keefektifan pengendalian disebut juga dengan pengujian pengendalian (*test of control*). Sebagai contoh, pengendalian internal klien membutuhkan verifikasi oleh klerk independen atas semua harga jual per unit

sebelum faktur penjualan dikirimkan ke pelanggan, maka auditor dapat menguji keefektifan pengendalian ini dengan memeriksa salinan faktur penjualan yang telah diparaf oleh klerk tersebut yang menunjukkan bahwa harga jual per unit telah diverifikasi. Auditor juga akan melakukan evaluasi terhadap pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi jumlah transaksi (*substantive test of transactions*). Pengujian substantif atas transaksi juga digunakan untuk menentukan apakah tujuan audit terkait dengan transaksi (asersi transaksi dan peristiwa) telah dipenuhi.

3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan bukti terkait dengan keterjadian transaksi dan mengetahui apabila terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya telah masuk akal. Sedangkan pengujian atas rincian saldo (*test of detail balances*) merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, ketepatan piutang usaha, dapat dilakukan dengan komunikasi tertulis secara langsung dengan para pelanggan klien guna mengidentifikasi jumlah yang salah.

4. Menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit

Pada tahap ini auditor mengumpulkan bukti audit, mengevaluasi hasil, dan menggabungkan informasi yang ditemukan selama proses audit untuk mencapai kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan.

Menurut Arens, *et al* (2017), tujuan audit dibagi berdasarkan asersi yang ingin diuji oleh auditor, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Asersi tentang transaksi dan peristiwa

*a. Occurance*

Asersi *occurance* memperhatikan tentang transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama periode akuntansi. Sebagai contoh manajemen menegaskan bahwa transaksi penjualan yang dicatat merupakan pertukaran barang atau jasa dengan pelanggan yang benar-benar terjadi.

*b. Completeness*

Asersi *completeness* membahas apakah semua transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh manajemen menegaskan bahwa semua penjualan barang dan jasa telah dicatat dan dimasukkan dalam laporan keuangan.

*c. Accuracy*

Asersi *accuracy* membahas apakah transaksi telah dicatat dalam jumlah yang benar. Sebagai contoh, penggunaan harga yang salah untuk mencatat transaksi penjualan dan kekeliruan atau kesalahan dalam menghitung perkalian harga dengan kuantitas merupakan salah satu contoh pelanggaran atas asersi keakuratan.

*d. Classification*

Asersi *classification* membahas apakah transaksi telah dicatat dalam akun yang tepat. Sebagai contoh, pencatatan penjualan secara tunai sebagai

penjualan secara kredit merupakan contoh pelanggaran atas asersi klasifikasi.

e. *Cut Off*

Aseri *cut off* membahas apakah transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Sebagai contoh, transaksi penjualan harus dicatat pada tanggal pengiriman barang.

2. Asersi tentang *account balances*

a. *Existence*

Aseri *existence* membahas apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang terdapat dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa persediaan barang dagang yang tercantum dalam neraca ada dan tersedia untuk dijual pada tanggal neraca.

b. *Completeness*

Aseri *completeness* membahas apakah semua akun dan jumlah saldo telah dicatat semua dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa wesel bayar di neraca mencakup semua kewajiban entitas.

c. *Valuation and Allocation*

Aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan telah dinilai pada jumlah yang sesuai dengan *fair value* atau *net realizable value* dan hasil dari *valuation adjustment* harus dicatat dengan tepat. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa piutang usaha yang dicantumkan dalam neraca dinyatakan dalam nilai realisasi bersih.

d. *Right and Obligation*



Asersi ini membahas apakah aset adalah hak milik entitas dan apakah liabilitas adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa aktiva yang dimiliki oleh perusahaan atau jumlah yang dikapitalisasi untuk *lease* dalam neraca merupakan biaya atas hak entitas untuk *me-lease*-kan properti dan kewajiban *lease* yang terkait dengan aktiva tersebut merupakan kewajiban entitas.

3. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan

*a. Occurance and right and obligations*

Asersi ini membahas apakah pengungkapan yang telah terjadi merupakan hak dan kewajiban milik entitas. Sebagai contoh, wesel bayar yang diuraikan dalam catatan atas laporan keuangan merupakan kewajiban perusahaan.

*b. Completeness*

Asersi ini membahas apakah semua pengungkapan yang diperlukan telah dicatat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, semua pengungkapan yang diperlukan terkait dengan wesel bayar telah dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.

*c. Accuracy and Valuation*

Asersi ini membahas apakah informasi keuangan telah diungkapkan dengan jumlah yang tepat dan wajar. Sebagai contoh, pengungkapan catatan atas laporan keuangan yang berkaitan dengan wesel bayar sudah akurat.

*d. Classification and Understandability*

Asersi ini berhubungan dengan jumlah yang diklasifikasikan tepat dalam laporan keuangan dan penjelasan neraca serta pengungkapan dapat dipahami.

Sebagai contoh, wesel bayar secara tepat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, dan pengungkapan laporan keuangan yang berkaitan dapat dipahami.

Menurut Arens, *et al* (2017), terdapat 5 jenis pengujian yang dapat dilakukan oleh auditor, untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, yaitu:

#### 1. *Risk Assessment Procedures*

Prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh pemahaman atas suatu perusahaan dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal perusahaan untuk menilai risiko salah saji yang terdapat di dalam laporan keuangannya. Sebagai contoh, ketika mengaudit sebuah perusahaan asuransi jiwa, auditor harus memahami bagaimana polis kerugian dihitung.

#### 2. *Test of Controls.*

Prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk menilai risiko pengendalian untuk setiap transaksi yang terkait. Sebagai contoh, auditor melaksanakan *walkthrough* sistem sebagai bagian dari prosedur untuk mendapatkan pemahaman guna membantu auditor dalam menentukan apakah pengendalian telah berjalan dengan semestinya. Biasanya *walkthrough* diterapkan pada satu atau beberapa transaksi. Sebagai contoh, auditor dapat memilih satu transaksi penjualan untuk *walkthrough* sistem dari proses persetujuan kredit, kemudian mengikuti dari proses persetujuan kredit tersebut dari awal transaksi sampai dengan pemberian kredit.

#### 3. *Substantive Test of Transaction*

Prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk menguji adanya salah saji moneter yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi (*occurrence, completeness, accuracy, classification, dan cut off*) telah dipenuhi bagi setiap kelas transaksi. Sebagai contoh, auditor dapat membandingkan apakah harga jual per unit pada salinan faktur penjualan dengan daftar harga resmi sudah tepat, yang dilakukan untuk memenuhi tujuan audit berkaitan dengan keakuratan transaksi.

#### 4. *Substantive Analytical Procedures*

Prosedur yang dilakukan oleh auditor, dimana auditor membuat prediksi jumlah catatan atau rasio untuk menyediakan bukti pendukung atas jumlah suatu akun. Dua tujuan yang paling penting dari prosedur analitis dalam mengaudit saldo akun adalah menunjukkan salah saji yang mungkin dalam laporan keuangan, dan memberikan bukti substantif. Sebagai contoh, untuk memberikan kepastian bagi tujuan keakuratan atas transaksi penjualan, auditor dapat memeriksa transaksi penjualan dalam jurnal penjualan meyangkut jumlah yang secara tidak biasa besar dan membandingkan total penjualan bulanan dengan penjualan tahun sebelum-sebelumnya. Jika perusahaan terus menggunakan harga jual yang tidak tepat atau mencatat penjualan secara tidak tepat, perbedaan yang signifikan mungkin akan terjadi.

#### 5. *Test of Detail Balances*

Prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk menguji adanya salah saji moneter yang menentukan bahwa tujuan audit terkait saldo telah dilaksanakan untuk

setiap saldo yang signifikan. Pengujian ini berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk neraca maupun laporan laba rugi. Contohnya meliputi: konfirmasi saldo pelanggan menyangkut piutang usaha, pemeriksaan fisik persediaan, dan pemeriksaan laporan vendor tentang utang usaha.

Menurut Arens, *et al.* (2017), berikut merupakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup:

1. *Physical Examination* (Pemeriksaan Fisik)

Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aset berwujud oleh auditor. Jenis bukti ini paling sering berkaitan dengan persediaan dan kas, tetapi juga diterapkan pada verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan aset berwujud. Pemeriksaan fisik secara langsung untuk memverifikasi apakah suatu aktiva benar-benar ada (tujuan eksistensi), dan pada tingkat tertentu apakah aktiva yang ada itu telah dicatat (tujuan lengkap).

2. *Confirmation* (Konfirmasi)

Konfirmasi menggambarkan penerimaan respons tertulis atau lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor. Karena konfirmasi berasal dari sumber yang independen terhadap klien, jenis bukti audit ini sangat dipercaya dan merupakan jenis audit yang sering digunakan. Terdapat dua jenis konfirmasi yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif merupakan jenis konfirmasi dimana responden diminta untuk memberikan respon, untuk menunjukkan apakah responden setuju dengan informasi tersebut. Sedangkan konfirmasi negatif merupakan konfirmasi dimana responden diminta untuk merespon hanya bila

informasinya tidak benar, dan tidak ada pengujian tambahan apabila respon tidak diterima.

### 3. *Inspection* (Inspeksi)

Inspeksi adalah pengujian auditor pada dokumen dan pencatatan klien untuk memperkuat informasi yang harus ada dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Dokumen diklasifikasikan menjadi dua yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang disiapkan dan digunakan dalam organisasi klien, contohnya adalah faktur penjualan, laporan jam kerja karyawan, dan laporan penerimaan persediaan. Sedangkan dokumen eksternal adalah dokumen yang ditangani oleh seseorang di luar organisasi klien yang merupakan pihak yang melakukan transaksi, contohnya adalah faktur dari pemasok, sertifikat tanah, dan perjanjian utang.

### 4. *Analytical Procedures* (Prosedur Analitikal)

Prosedur analitis merupakan evaluasi dari informasi keuangan melalui analisis hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dan non keuangan. Contohnya adalah ketika auditor membandingkan persentase margin kotor tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

### 5. *Inquiries of the Client* (Penyelidikan Klien)

Penyelidikan klien adalah perolehan informasi secara tertulis ataupun lisan dari klien dalam rangka menjawab pertanyaan dari auditor.

### 6. *Recalculation* (Perhitungan Ulang)

Perhitungan ulang meliputi memeriksa kembali perhitungan yang dilakukan oleh klien. Contohnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap perkalian faktur

penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal, pengecekan terhadap kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar di muka.

7. *Reperformance* (Pelaksanaan Ulang)

Pelaksanaan ulang adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur akuntansi klien dan kontrol yang dibuat sebagai bagian dari akuntansi entitas dan sistem internal kontrol. Contohnya adalah ketika auditor membandingkan harga yang tertera dalam faktur dengan harga yang resmi, atau melaksanakan kembali penentuan umur piutang usaha.

8. *Observation* (Observasi)

Observasi meliputi pengelihatian pada proses atau prosedur yang dilakukan pihak lain yang bersangkutan. Contohnya adalah auditor dapat mengunjungi lokasi pabrik klien untuk memperoleh kesan umum atas fasilitas klien, atau mengamati para individu yang melaksanakan tugas akuntansi untuk menentukan apakah individu yang disertai tanggung-jawab telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Menurut Arens, *et al.* (2017), terdapat 4 komponen dalam risiko audit:

1. *Planned Detection Risk* (Risiko Deteksi yang Direncanakan)

Risiko bahwa bukti audit untuk suatu segmen akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi salah saji yang dapat ditoleransi.

2. *Inherent Risk* (Risiko Inheren)

Risiko inheren mengukur penilaian atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam segmen, sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian

internal.

3. *Control Risk* (Risiko Pengendalian)

Risiko kontrol mengukur penilaian auditor mengenai apakah salah saji yang melebihi jumlah yang dapat ditoleransi dalam suatu segmen akan dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien.

4. *Acceptable Audit Risk* (Risiko Audit yang Dapat Diterima)

Risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai, dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan.

## **2.3 Opini Audit**

Standar Audit (SA) 700 menyatakan bahwa auditor harus melaporkan apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan laporan keuangan yang berlaku. Opini audit dibagi menjadi dua, yaitu opini tanpa modifikasian dan opini dengan modifikasian. Opini tanpa modifikasian atau yang dikenal sebagai opini wajar tanpa pengecualian merupakan opini yang diberikan apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Dalam melaporkan opini audit tanpa modifikasian, terdapat bentuk baku yang telah diatur dalam SA 700, yaitu:

1. Judul adalah bagian yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut

merupakan laporan auditor independen.

2. Pihak yang dituju, berisi pihak yang ditunjukkan untuk menerima laporan audit yang disampaikan, sebagaimana yang seharusnya menurut perikatan.
3. Paragraf pendahuluan adalah bagian yang berisi identifikasi entitas, pernyataan oleh auditor bahwa laporan keuangan entitas telah diaudit, identifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan.
4. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan yang berisi penjelasan auditor mengenai tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Bagian ini harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kesalahan.
5. Tanggung jawab auditor adalah bagian yang menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan melalui audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan juga harus menegaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan



penyajian material.

6. Opini auditor, pada bagian ini menyatakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang diaudit. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus menggunakan frasa “Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, ..... Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, kecuali jika diharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan.
7. Tanggung jawab pelaporan lainnya adalah bagian yang menyatakan bila auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul “Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan Regulasi”, atau judul lain yang dianggap tepat.
8. Tanda tangan auditor, tanggal laporan audit, dan alamat auditor juga harus dicantumkan dalam laporan auditor.

Dalam pemberian opini audit tanpa modifikasian, auditor akan menambahkan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf lain dalam laporan auditor independen ketika auditor menganggap perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada suatu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan serta hal lain selain yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan karena dianggap fundamental dan relevan bagi para pengguna

laporan keuangan atas tanggung jawab auditor. Menurut IAPI dalam SA 706, ketika auditor mencantumkan paragraf penekanan suatu hal dalam laporannya, auditor harus:

1. Meletakkan paragraf tersebut segera setelah paragraf opini dalam laporan auditor.
2. Menggunakan judul “Penekanan Suatu Hal” atau judul lain yang tepat.
3. Mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan tempat hal tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan.
4. Mengindikasikan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal yang ditekankan tersebut.

Menurut SA 706 (2013), terdapat beberapa kondisi saat auditor perlu mempertimbangkan untuk mencantumkan suatu paragraf Penekanan Suatu Hal yaitu:

1. Suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh regulator.
2. Penerapan dini (jika diizinkan) atas suatu standar akuntansi baru yang berdampak pervasif terhadap laporan keuangan sebelum tanggal efektif berlakunya.
3. Suatu bencana alam besar yang mempunyai dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas.

Adapun opini modifikasian merupakan opini yang diberikan oleh auditor

berdasarkan bukti audit yang diperoleh, bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Menurut SA 705, terdapat tiga opini modifikasian, yaitu:

1. Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian apabila:

- a. Setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun agregasi, adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau
- b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif.

2. Opini tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar setelah auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian secara individual adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini tidak menyatakan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan

pervasif.

**Gambar 2.1**

**Tabel Opini Modifikasi**

| Sifat hal-hal yang menyebabkan modifikasi opini                  | Pertimbangan auditor tentang seberapa pervasif dampak atau kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan |                                 |
|--|---|---------------------------------|
|  | Material tetapi tidak pervasif  | Material dan pervasif           |
| Laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material         | Opini wajar dengan pengecualian   | Opini tidak wajar               |
| Ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat | Opini wajar dengan pengecualian   | Opini tidak menyatakan pendapat |

*Sumber: SPAP SA 705*

## **2.4 Opini Audit *Going Concern***

Selama melakukan proses audit, auditor juga perlu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Hal ini tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang penyajian laporan keuangan, yang mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Dalam SA 570, *going concern* didefinisikan sebagai sebuah

asumsi yang menyatakan bahwa suatu entitas dipandang akan bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti *audit* yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah, menurut pertimbangan auditor, terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang, baik secara individual maupun kolektif, dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang, menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk:

- a. Dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar: penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau
- b. Dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menyusun pedoman bagi *auditor* dalam memberikan opini audit sehubungan dengan masalah *going concern* perusahaan, sesuai dalam SA 570, yaitu:

1. Jika *auditor* menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian

material, maka *auditor* harus menentukan apakah laporan keuangan:

- a. Menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi kondisi tersebut; dan
  - b. Mengungkapkan secara jelas ketidakpastian material yang terkait dengan kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
2. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporan auditor untuk:
- a. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya; dan
  - b. Mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam poin sebelumnya.
3. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya.
4. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar.

5. Dalam kondisi tertentu, auditor perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor, karena tidak mungkin bagi auditor untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen.

Terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha yang diuraikan dalam SA 570, yaitu:

1. Keuangan:
  - a. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih.
  - b. Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan; atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang.
  - c. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditur.
  - d. Arus kas operasi negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif.
  - e. Rasio keuangan utama yang buruk.
  - f. Kerugian operasi yang substantial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas.
  - g. Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan.
  - h. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo.
  - i. Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman.

- j. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman.
  - k. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi isensial lainnya.
2. Operasi:
- a. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya.
  - b. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian.
  - c. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, wara laba, lisensi, atau pemasok utama.
  - d. Kesulitan tenaga kerja.
  - e. Kekurangan penyediaan barang/bahan.
  - f. Munculnya kompetitor yang sangat berhasil.
3. Lain-lain:
- a. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori lainnya.
  - b. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas.
  - c. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas.
  - d. Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan.



Rencana manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen dalam SA 570 (IAPI, 2013) yaitu:

1. Rencana untuk menjual aktiva

- a. Pembatasan terhadap penjualan aktiva, seperti adanya pasal yang membatasi transaksi tersebut dalam perjanjian penarikan utang atau perjanjian serupa.
- b. Kenyataan dapat dipasarkannya aktiva yang direncanakan akan dijual oleh manajemen.
- c. Dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari penjualan aktiva.

2. Rencana penarikan utang atau restrukturisasi utang

- a. Tersedianya pembelanjaan melalui utang, termasuk perjanjian kredit yang telah ada atau yang telah disanggupi, perjanjian penjualan piutang atau jual-kemudian sewa aktiva (*sale-leaseback of assets*).
- b. Perjanjian untuk merestrukturisasi atau menyerahkan utang yang ada maupun yang telah disanggupi atau untuk meminta jaminan utang dari entitas.
- c. Dampak yang mungkin timbul terhadap rencana manajemen untuk penarikan utang dengan adanya batasan yang ada sekarang dalam menambah pinjaman atau cukup atau tidaknya jaminan yang dimiliki entitas.

3. Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran
  - a. Kelayakan rencana untuk mengurangi biaya *overhead* atau biaya administrasi, untuk menunda biaya penelitian dan pengembangan, untuk menyewa sebagai alternatif membeli.
  - b. Dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari pengurangan atau penundaan pengeluaran.
4. Rencana untuk meningkatkan modal
  - a. Kelayakan rencana untuk menaikkan modal pemilik, termasuk perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk menaikkan tambahan modal.
  - b. Perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk mengurangi dividen atau untuk mempercepat distribusi kas dari perusahaan afiliasi atau investor lain.

## **2.5 Rasio Likuiditas**

Menurut Pradika (2017) likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu berarti perusahaan tersebut dalam kondisi likuid. Menurut Fahmi (2011) dalam Miraningtyas dan Yudowati (2019) rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio likuiditas dapat memberikan tanda awal mengenai masalah arus kas dan kegagalan usaha yang akan dihadapi perusahaan di masa mendatang karena tanda awal terjadinya kesulitan keuangan dan kebangkrutan adalah nilai likuiditas yang rendah atau menurun.

Menurut Weygandt (2019) terdapat beberapa jenis rasio likuiditas, yaitu:

1. *Current Ratio*

Mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan liabilitas lancar.

2. *Quick Ratio*

Menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar berupa kas, investasi jangka pendek, dan piutang. Rasio ini dihitung dengan cara menambahkan kas, investasi jangka pendek, dan piutang, kemudian dibagi dengan liabilitas lancar.

3. *Account Receivable Turnover*

Mengukur berapa kali suatu perusahaan menerima pembayaran atas piutangnya pada suatu periode tertentu. Rasio ini dihitung dengan cara membagi net penjualan kredit dengan rata-rata piutang usaha.

4. *Inventory Turnover*

Rasio yang mengukur berapa kali atau rata-rata persediaan yang dijual pada suatu periode tertentu. Rasio ini dihitung dengan cara membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata *inventory*.

5. *Days of receivable*

Rasio yang mengukur berapa hari secara rata-rata perusahaan menerima pembayaran tagihan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi rata-rata piutang dengan penjualan yang dibagi dengan 360 hari.

6. *Days of inventories*

Rasio ini mengukur berapa hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan yang

tersedia secara rata-rata. Rasio ini dihitung dengan cara membagi rata-rata persediaan dengan harga pokok penjualan yang dibagi dengan 360 hari.

Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Current Ratio*.

Rumus *Current Ratio* (Weygandt, 2019) adalah:

$$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Keterangan:

*CR* : *Current Ratio*

*Current Assets* : Total aset lancar

*Current Liabilities* : Total utang jangka pendek

Menurut IAI (2018) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 menyatakan bahwa aset lancar adalah aset perusahaan yang dimiliki untuk diperdagangkan, memiliki intensi untuk dijual atau digunakan dalam satu siklus operasi normal, dapat berupa kas dan setara kas yang penggunaannya minimal dua belas bulan setelah periode pelaporan, serta diperkirakan akan direalisasikan dalam periode dua belas bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

1. Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal
2. Entitas usaha mempunyai aset yang ditujukan untuk diperdagangkan.
3. Entitas usaha akan merealisasikan aset dalam rentang waktu periode satu tahun

buku (12 bulan) setelah laporan.

4. Kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk membayar kewajiban sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Menurut Kieso, *et al* (2017) *current assets* merupakan kas dan aset lain perusahaan yang diharapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai, dijual, atau digunakan dalam satu tahun atau dalam siklus operasi perusahaan. Jenis-jenis *current assets*:

1. *Cash* merupakan aset yang paling likuid, *cash* dapat berupa koin, cek, serta rekening bank milik perusahaan.
2. *Short-term investment*, dimana perusahaan harus melaporkan sekuritas perdagangan (utang atau ekuitas) sebagai aset lancar, dan semua perdagangan efek dilaporkan pada nilai wajar.
3. *Prepaid expense* adalah biaya yang sudah dibayar tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi.
4. *Receivables* adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan perusahaan.
5. *Inventories* adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual.

Suatu utang dapat dikatakan utang lancar jika (IAI, 2018):

- a. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal;

- b. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
- c. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan;
- d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Menurut Kieso, *et al* (2017), utang lancar adalah utang dengan dua karakteristik berikut:

- 1. Perusahaan memperkirakan untuk membayar utang dari aset lancar yang dimiliki atau dari timbulnya kewajiban lancar lainnya.
- 2. Perusahaan akan membayar utang dalam periode satu tahun atau siklus operasional.

Menurut Hery (2017), jenis-jenis utang lancar yaitu:

- 1. *Account payable* (Utang Usaha)

Utang usaha adalah kewajiban yang timbul pada saat barang atau jasa diterima sebelum melakukan pembayaran.

- 2. *Notes payable* (Utang Wesel)

Utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di masa yang akan datang.

- 3. *Unearned revenue* (pendapatan diterima di muka)

Kewajiban yang timbul akibat perusahaan telah menerima pembayaran terlebih dahulu namun belum melakukan pelaksanaan atas kewajibannya.

4. *Employees income taxes payable* (utang pajak penghasilan karyawan)

Merupakan jumlah pajak yang terhutang kepada pemerintah atas besarnya gaji karyawan yang terkena pajak penghasilan.

5. *Interest payable* (utang bunga)

Merupakan jumlah bunga yang terhutang kepada kreditur atas dana yang dipinjam.

6. *Sales taxes payable* (utang pajak penjualan)

Merupakan utang atas pajak yang dipungut dari pembeli ketika penjualan terjadi.

7. *Current maturities of long-term debt* (Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam satu tahun)

Merupakan sebagian dari kewajiban jangka panjang yang akan segera jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal satu tahun.

## **2.6 Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Opini Audit *Going Concern***

Lie dan Wardani (2016) menyatakan apabila sebuah perusahaan tidak memiliki kemampuan melunasi kewajiban jangka pendeknya, maka operasional perusahaan akan terganggu dan hal ini dapat menyebabkan auditor ragu dengan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Sedangkan menurut Fitriani dan Asiah (2018), semakin rendah tingkat likuiditas suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan tersebut untuk membayar para krediturnya tidak bisa

terpenuhi, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi liabilitas jangka pendeknya maka hal tersebut dapat memengaruhi kredibilitas perusahaan dan dapat dianggap bahwa perusahaan sedang berada dalam masalah dan akan mengganggu kelangsungan hidup usahanya, sehingga para auditor akan mengeluarkan opini audit *going concern* terhadap perusahaan tersebut. Penelitian Miraningtyas dan Yudowati (2019) menyatakan semakin rendah rasio likuiditasnya maka semakin rendah pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, namun sebaliknya semakin tinggi likuiditasnya maka perusahaan dianggap mampu untuk memenuhi utang jangka pendeknya sehingga tidak ada keraguan auditor mengenai kelangsungan usaha perusahaan dan dapat terhindar dari pemberian opini audit *going concern*.

Miraningtyas dan Yudowati (2019) membuktikan bahwa rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit *going concern*. Penelitian Indriyani (2019), juga menunjukkan bahwa *current ratio* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian Putranto (2018), mengindikasikan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Namun, berbeda dengan penelitian Pradika (2017) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*.

Berdasarkan penjelasan mengenai likuiditas dan pengaruhnya terhadap pemberian opini audit *going concern*, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Ha<sub>1</sub>: Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio (CR)* berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

## **2.7 Kinerja Keuangan**

Menurut Fahmi (2011) dalam Iskandar (2020), kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan. Penilaian atas kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas yaitu dengan menggunakan *return on assets (ROA)*. Menurut Kurniawati & Murti (2017), rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sebaliknya dengan tingkat profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan mengalami masalah keuangan dan hal ini akan menimbulkan keraguan terhadap kelangsungan usaha entitas.

Menurut Weygandt, *et al* (2019), rasio profitabilitas terdiri dari:

### *1. Profit Margin*

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan penjualan bersih.

## 2. *Asset Turnover*

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi penjualan bersih dengan rata-rata aset.

## 3. *Return on Assets (ROA)*

Rasio yang mengukur laba perusahaan yang diperoleh dari penggunaan aset perusahaan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata aset.

## 4. *Return on Shareholder's Equity*

Rasio yang mengukur profitabilitas perusahaan dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dapat perusahaan peroleh untuk setiap uang yang diinvestasikan oleh pemilik saham. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata modal pemegang saham biasa.

## 5. *Earning Per Share (EPS)*

Rasio yang mengukur laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa perusahaan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar.

## 6. *Price Earning Ratio*

Rasio yang menghitung kemampuan suatu saham dalam menghasilkan laba atau mengukur tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada suatu saham. Rasio ini dihitung dengan cara membagi harga pasar per lembar saham dengan laba per saham.

## 7. Payout Ratio

Rasio yang mengukur persentase dari laba yang didistribusikan dalam bentuk dividen kas. Rasio ini dihitung dengan cara membagi dividen tunai dengan laba bersih.

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets (ROA)*. *ROA* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset perusahaan. Rumus untuk menghitung *Return on Assets* menurut Palepu, *et al* (2021) adalah:

$$ROA = \frac{\textit{Profit or Loss}}{\textit{Total Assets}}$$

Keterangan:

*ROA* : *Return on Assets*

*Profit or Loss* : Laba bersih atau rugi setelah pajak (laporan laba rugi komprehensif)

*Total Assets* : Rata-rata total aset, sumber daya yang dimiliki perusahaan baik aset lancar maupun tidak lancar.

Menurut Palepu, *et al* (2021), total aset yang digunakan dapat berupa aset pada awal tahun, akhir tahun, atau rata-rata saldo awal dan akhir dalam satu tahun. Penggunaan nilai rata-rata dianggap paling tepat karena dapat menghilangkan fluktuasi antara nilai awal dan akhir pada total aset. Menurut Weygandt, *et al*. (2019) rumus menghitung *average total assets* adalah:

$$\text{Average Total Assets} = \frac{\text{Total Assets}_t + \text{Total Assets}_{t-1}}{2}$$

Keterangan:

*Average Total Assets* : Rata-rata total aset

*Total Assets<sub>t</sub>* : Total aset tahun t

*Total Assets<sub>t-1</sub>* : Total aset 1 tahun sebelum tahun t

Menurut Kieso (2017), *net income* merupakan hasil bersih dan kinerja perusahaan selama satu periode waktu. Komponen yang membentuk laba adalah pendapatan dan beban. Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2018), laba tahun berjalan (*net income*) disajikan dalam laporan laba rugi. Laba tahun berjalan diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok penjualan sehingga menghasilkan laba bruto. Menurut Kieso, *et al* (2017), unsur-unsur penyusun *net income*, yaitu:

1. Pendapatan, adalah jumlah pendapatan neto yang terdiri atas penjualan (*sales*), setelah dikurangi dengan diskon (*sales discount*) dan retur penjualan (*sales return and allowance*). *Sales revenue (sales)* adalah sumber utama pendapatan perusahaan, yang dihasilkan dari menjual produk. *Sales discount* adalah pengurangan harga yang diberikan oleh penjual. Penjual akan memberikan *sales discount* karena beberapa alasan seperti membeli barang secara tunai dalam jumlah yang besar, dan melunasi utang sebelum jatuh tempo atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan dalam syarat pembayaran. *Sales return and allowance* adalah transaksi dimana penjual menerima barang kembali dari pembeli (*sales return*) atau memberikan pengurangan dalam harga beli (*sales*

*allowance*) sehingga pembeli akan menyimpan barang. *Sales return and allowance* biasanya terjadi karena pembeli merasa tidak puas dengan barang yang dibeli karena rusak atau cacat, berkualitas rendah, atau tidak memenuhi spesifikasi sehingga penjual akan memberikan potongan harga.

2. Setelah itu, pendapatan akan dikurangi dengan beban pokok penjualan yang menunjukkan beban/biaya penjualan yang berkaitan langsung untuk menghasilkan penjualan selama periode pelaporan. Sehingga, akan menghasilkan laba bruto.
3. Laba bruto dikurangi dengan biaya operasi (*operating expense*) akan menghasilkan laba dari operasional (*income from operations*). *Operating expense* adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses mendapatkan penghasilan pendapatan atas penjualan.
4. Laba dari operasional akan ditambah dengan pendapatan dan beban lainnya (*other income and expense*) sehingga menghasilkan laba sebelum pajak (*income before income taxes*). Pendapatan dan beban lainnya (*other income and expense*) adalah pendapatan dan pengeluaran yang terdiri dari berbagai keuntungan dan kerugian yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasi utama perusahaan, contohnya adalah pendapatan bunga, pendapatan dividen, pendapatan sewa, dan keuntungan atau kerugian dari menjual properti, dan peralatan.
5. Kemudian, Laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan akan menghasilkan laba tahun berjalan (*net income*).

Menurut Weygandt *et al.*, (2019), rata-rata total aset merupakan hasil penjumlahan saldo total aset pada awal dan akhir periode yang dibagi dua. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan menggunakan asetnya dalam menjalankan aktivitas perusahaan seperti produksi dan penjualan (Weygandt *et al.*, 2019). Total aset terdiri atas seluruh jenis aset yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, yaitu *current assets (inventories, receivables, prepaid expenses, short-term investment, cash and equivalent)* dan *non-current assets (intangible assets, property, plant, and equipment, dan long-term investment)*.

## **2.8 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Opini Audit *Going Concern***

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba, sebaliknya dengan tingkat profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian (Pradika, 2017). Semakin tinggi *ROA* membuktikan kinerja entitas yang semakin bagus dalam menghasilkan keuntungan maka tidak menyebabkan keraguan bagi auditor akan keahlian entitas dalam melanjutkan usahanya dan dapat mengurangi kemungkinan pemberian opini audit *going concern*. Sedangkan perusahaan dengan nilai profitabilitas yang rendah, akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *going concern* (Benny, 2016). Menurut Lie dan Wardani (2016) semakin rendah nilai profitabilitas sebuah perusahaan, maka semakin rendah juga

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga akan menyebabkan keraguan auditor atas kelangsungan usaha perusahaan, sebaliknya jika profitabilitas perusahaan tinggi, menunjukkan semakin tinggi juga kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sehingga tidak akan muncul keraguan akan kelangsungan usaha dari perusahaan.

Penelitian Sudarno (2019) dan Pradika (2017) menyatakan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*. Penelitian Irwanto dan Tanusdjaja (2020) yang berpendapat bahwa pengujian atas variabel profitabilitas yang diproksikan dengan menggunakan *ROA*, berpengaruh secara negatif terhadap opini audit *going concern*. Namun, berbeda dengan penelitian Lie dan Wardani (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Berdasarkan penjelasan mengenai profitabilitas dan pengaruhnya terhadap pemberian opini audit *going concern*, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha<sub>2</sub>: Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan menggunakan *Return on Assets (ROA)* berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

## **2.9 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan skala besar atau kecilnya perusahaan yang digambarkan melalui total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar (Kurniawati dan Murti, 2017). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari kondisi keuangan

perusahaan misalnya besarnya aset total (Pradika, 2017). UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan kategori ukuran perusahaan antara lain adalah (*ojk.go.id*):

**Tabel 2.1**  
**Kategori Ukuran Perusahaan**

| UKURAN PERUSAHAAN | Kriteria  |                   |
|-------------------|---|-------------------|
|                   | Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) | Penjualan Tahunan |
| Usaha Mikro       | Max 50 jt   | Max 300 jt        |
| Usaha Kecil       | > 50 jt – 100 jt                                    | > 300 jt – 2,5 M  |
| Usaha Menengah    | > 100 jt – 10 M                                     | > 2,5 M – 50 M    |

Sumber: UU No. 20 tahun 2008

Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan rumus (Amrullah, 2020):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Assets})$$

Keterangan:

$\ln \text{ Total Assets}$  : *Logaritma Natural* dari total aset perusahaan

Menurut PSAK No. 16 tahun 2011 aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Menurut Weygandt, *et al.* (2019) total aset terdiri dari, yaitu: aset lancar (*Current Assets*) merupakan aset perusahaan yang diharapkan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun. seperti: *supplies, inventories, account receivables, note receivables, cash, short term investment*, dan *prepaid insurance*.



Menurut Weygandt, *et al* (2019) aset tidak lancar (*non-current assets*) adalah aset yang diharapkan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Contoh dari aset tidak lancar adalah:

1. Investasi jangka panjang (*long-term investments*)

*Long-term investments* adalah investasi yang tidak dapat dipasarkan atau manajemen tidak berniat untuk mengubahnya menjadi uang tunai dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi yang lebih lama. Contohnya adalah investasi utang (*debt investments*), investasi saham (*share investments*), investasi pada aset berwujud, dan investasi pada *special fund* seperti *sinking fund* dan *pension fund*. *Debt investments* adalah investasi kepada pemerintah dan korporasi dalam bentuk surat utang dan obligasi. Sedangkan *share investments* adalah investasi dalam bentuk saham dari perusahaan lain. Investasi pada aset berwujud merupakan investasi pada aset berwujud yang tidak sedang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, contohnya adalah tanah yang dimiliki untuk keperluan lain. *Sinking funds* adalah simpanan jangka panjang yang dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran yang terjadi di masa mendatang. Sedangkan menurut PSAK No. 18 tahun 2017 tentang Akuntansi Dana Pensiun, menjelaskan bahwa dana pensiun (*pension fund*) adalah perjanjian untuk setiap entitas yang menyediakan manfaat purnakarya (baik dalam iuran bulanan atau *lump sum*) untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti kerja, dapat diestimasi sebelum purnakarya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik entitas.

2. Properti pabrik dan peralatan (*property plant and equipment*)

*Property, plant, equipment* adalah aset berwujud jangka panjang yang digunakan untuk kebutuhan operasi dalam bisnis seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Perusahaan biasanya menggunakan tanah (*land*) sebagai lokasi pembuatan pabrik atau gedung perkantoran. Harga perolehan tanah meliputi harga pembelian secara tunai, biaya penutupan seperti biaya kepemilikan dan pengacara, komisi broker *real estate*, dan hak gadai lainnya yang ditanggung pembeli. Gedung (*building*) merupakan fasilitas yang digunakan dalam operasional perusahaan, seperti toko, kantor, pabrik. Ketika gedung dibeli, biaya yang termasuk dalam harga beli yaitu biaya penutupan seperti biaya asuransi hak milik dan komisi broker *real estate*. Peralatan (*equipment*) merupakan aset yang digunakan dalam kegiatan operasi, seperti perabot kantor, mesin, truk pengiriman. Harga pembelian peralatan termasuk harga pembelian secara tunai, pajak penjualan, biaya pengiriman, asuransi, pengeluaran lainnya seperti biaya perakitan, pemasangan, dan percobaan.

### 3. Aset lainnya (*other assets*)

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Contoh dari aset lainnya adalah aset berwujud yang dimiliki untuk dijual dan piutang jangka panjang.

### 4. Aset tak berwujud (*intangible assets*)

*Intangible assets* merupakan aset yang tidak memiliki wujud fisik dan bukan instrumen keuangan. Contoh dari *intangible asset* yaitu *patent*, *copyrights*, *franchise*, *goodwill*, *trademarks*, *tradenname*, dan *customer list*.

Menurut Hery (2018), jenis-jenis *intangible assets* yaitu:

1. *Patent*

Merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara, yang memungkinkan penemu (inventor) untuk mengendalikan penciptaan (perakitan), penjualan, atau penggunaan hasil temuannya.

2. *Trademark*

Merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara, yang mengizinkan penggunaan simbol (lambang logo), label (nama) atau slogan, dan pola atau bentuk (*design*) tertentu, yang membedakan sebuah produk atau jasa dari produk atau jasa lainnya yang serupa.

3. *Copyrights*

Merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara, yang memperbolehkan pengarang atau penulis untuk menerbitkan, menjual, dan mengendalikan hasil tulisan, artistik, atau karangan musik.

4. *Franchise*

Merupakan hak eksklusif yang diterima oleh perusahaan atau perorangan untuk menjalankan fungsi tertentu atau menjual produk atau jasa tertentu.

5. *Customer list*

Merupakan sebuah daftar atau *database* yang berisi informasi mengenai pelanggan (konsumen), seperti nama, alamat, catatan atau *track record* pembelian pada masa lalu, dan seterusnya.

6. *Goodwill*

Merupakan sumberdaya, faktor, dan kondisi yang tidak berwujud lainnya, yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan di atas normal.

## **2.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern***

Santosa dan Wedari (2007) dalam Pradika (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*. Di mana perusahaan yang kecil akan berisiko menerima opini audit *going concern* dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar. Hal ini dimungkinkan karena auditor mempercayai bahwa perusahaan yang lebih besar dapat menyelesaikan kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan yang lebih kecil. Menurut Tandungan dan Mertha (2016), semakin tinggi total aset yang dimiliki, maka perusahaan dianggap memiliki ukuran yang besar sehingga mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Semakin kecil skala perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan yang lebih kecil dalam pengelolaan usahanya. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini audit *going concern*.

Menurut penelitian Stefani, *et al* (2020) dan Amrullah (2020), ukuran perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan total aset berpengaruh secara negatif terhadap opini audit *going concern*. Sejalan dengan penelitian Maruf (2020), yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Namun, berbeda dengan penelitian Tandungan dan Mertha (2016), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Berdasarkan penjelasan mengenai ukuran perusahaan dan pengaruhnya terhadap pemberian opini audit *going concern*, maka hipotesis ketiga dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha3: Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan total aset berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

## **2.11 Rasio *Leverage***

Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Anita, 2017). Menurut Utami, *et al* (2017) dalam Putranto (2018) rasio *leverage* digunakan untuk mengukur potensi perusahaan dalam menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Menurut Weygandt, *et al* (2019), rasio *leverage* terdiri dari:

### *1. Debt to Assets Ratio*

Rasio ini mengukur persentase total aset yang berasal dari kreditur. Rasio ini dihitung dengan cara membagi total utang dengan total aset.

### *2. Debt to Equity Ratio*

Rasio ini membandingkan jumlah utang dengan ekuitas. Rasio ini dihitung dengan cara membagi total utang dengan total ekuitas.

### *3. Times Interest Earned*

Rasio ini memberikan indikasi atas kemampuan perusahaan membayar bunga saat jatuh tempo. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba sebelum pajak dan bunga dengan biaya atau beban bunga.

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Debt to Total Assets Ratio*

(DTA). Menurut Tyas dan Ismawati (2018) *Debt to Total Assets Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat persentase utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki atau seberapa besar tingkat persentase total aset dibiayai dengan utang. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Debt to Total Assets Ratio* menurut Weygandt, *et al.* (2019) adalah:

$$DTA = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

*DTA* : *Debt to Total Assets Ratio*

*Total Debt* : Seluruh utang perusahaan, baik utang jangka panjang maupun pendek.

*Total Assets* : Seluruh aset perusahaan

Utang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu utang lancar dan utang tidak lancar. Utang lancar (jangka pendek) adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (1 tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Yang termasuk utang lancar antara lain, yaitu utang usaha, utang wesel jangka pendek, beban yang masih harus dibayar, dan utang gaji dan upah.

Utang tidak lancar adalah kewajiban yang diperkirakan secara memadai tidak akan dilikuidisasi dalam siklus operasi normal, melainkan dibayar di luar tanggal waktu tersebut (IAI, 2018). Menurut Kieso, *et al* (2017), utang tidak lancar

adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar setelah satu tahun. Jenis-jenis *non-current liabilities* yaitu:

1. *Bonds payable* (obligasi)

Merupakan bentuk wesel bayar berbunga. Untuk mendapatkan modal dengan jumlah yang besar, manajemen perusahaan biasanya harus memutuskan apakah akan menerbitkan atau menjual obligasi kepada publik.

2. *Long-term notes payable*

Merupakan utang wesel yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun.

3. *Mortgage payable*

Merupakan sebuah utang jangka panjang yang dijaminakan menggunakan aset secara spesifik untuk suatu pinjaman.

4. *Lease liability*

Merupakan kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian kontrak antara pemberi sewa dengan penyewa.

Menurut Kieso, *et al* (2018) menyatakan bahwa total aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan atas hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang bagi perusahaan. Aset dibagi menjadi dua, yakni *current assets* (*cash, short-term investment, prepaid expense, inventory, dan receivables*) dan *non-current assets* (*plant, equipment, long-term investment, dan intangible assets*). Total aset yang disajikan dalam *statement of financial position* merupakan penjumlahan antara *current assets* dan *non-current assets*.

Menurut IAI (2018), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut Kieso, *et al* (2018) aset tetap memiliki 3 karakteristik utama, yaitu:

1. Dibeli untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak untuk dijual kembali.
2. Dapat digunakan untuk waktu yang lama dan umumnya di depresiasi.
3. Memiliki unsur fisik.

## **2.12 Pengaruh Rasio *Leverage* terhadap Opini Audit *Going Concern***

Menurut Lie dan Wardani (2016), apabila suatu perusahaan memiliki rasio *leverage* yang tinggi, perusahaan tersebut cenderung memiliki utang yang tinggi. Hal ini akan meningkatkan risiko yang mungkin akan dihadapi perusahaan, terutama dalam hal pembayaran utang dan bunga. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi akan cenderung mengalami kesulitan keuangan. Hal ini secara tidak langsung akan menimbulkan keraguan auditor atas kemampuan *going concern* perusahaan. Sejalan dengan penelitian Tyas dan Ismawati (2018), yang menyatakan bahwa semakin besar tingkat *Debt to Total Assets Ratio (DTA)* akan menyebabkan timbulnya keraguan terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan, karena sebagian besar dana yang diperoleh oleh perusahaan akan digunakan untuk membiayai utang dan dana untuk beroperasi



akan semakin berkurang.

Penelitian Anita (2017) menyatakan bahwa rasio *leverage* yang diproksikan dengan menggunakan *debt to total assets ratio* berpengaruh secara positif terhadap opini audit *going concern*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Lie dan Wardani (2016) yang menyatakan bahwa rasio *leverage* yang diproksikan dengan *debt to total assets ratio* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian Minerva dan Wijaya (2020), yang menyatakan bahwa rasio *leverage* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Berdasarkan penjelasan mengenai *leverage* dan pengaruhnya terhadap pemberian opini audit *going concern*, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha<sub>4</sub>: *Leverage* yang diproksikan dengan menggunakan *Debt to Total Assets Ratio (DTA)* berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

## **2.13 Perubahan Penjualan**

Perubahan penjualan merupakan indikasi suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Amrullah, 2020). Menurut Pratiwi dan Lim (2018) pertumbuhan perusahaan menunjukkan kekuatan perusahaan dalam industri dan mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan menunjukkan aktivitas operasional yang positif, artinya perusahaan berjalan dengan semestinya sehingga perusahaan dapat mempertahankan posisi ekonominya dan kelangsungan hidupnya.

Sedangkan *negative growth* mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar ke arah kebangkrutan. Menurut Gusti dan Yudowati (2018), tingkat pertumbuhan perusahaan yang dihitung dapat berupa perubahan penjualan, laba bersih, dan pertumbuhan aset. Dalam penelitian ini, pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan menggunakan rasio perubahan penjualan. Menurut Suharsono (2018), rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Penjualan merupakan kegiatan operasi utama perusahaan. Penjualan perusahaan yang meningkat dari tahun ke tahun memberi peluang perusahaan untuk memperoleh peningkatan laba. Menurut Wijaya (2019), *sales growth* adalah perbandingan tingkat penjualan, dimana akan semakin baik jika penjualan tahun ini lebih tinggi dari penjualan sebelumnya. Menurut Suharsono (2018), rumus untuk menghitung perubahan penjualan adalah:

$$\text{Perubahan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan Bersih}_t - \text{Penjualan Bersih}_{t-1}}{\text{Penjualan Bersih}_{t-1}}$$

Keterangan:

Penjualan Bersih<sub>t</sub> : Penjualan bersih tahun t

Penjualan Bersih<sub>t-1</sub> : Penjualan bersih 1 tahun sebelum tahun t

Menurut Kieso (2017), *net sales* merupakan pendapatan penjualan dikurangi dengan *sales return* dan *allowance*, dan dikurangi dengan *sales discount*. *Sales return* merupakan pengembalian barang dari pembeli ke penjual dengan uang tunai atau pengembalian secara kredit. *Sales allowance* merupakan potongan harga

jual barang dagangan yang diberikan oleh penjual sehingga pembeli akan menyimpan barang dagangan tersebut. Sedangkan *sales discount* adalah pengurangan yang diberikan oleh penjual untuk pembayaran segera atas penjualan kredit. Menurut Herlambang (2014) dalam Wijaya, *et al* (2019), tujuan pertumbuhan penjualan yaitu: untuk mencapai volume penjualan tertentu, mendapatkan laba tertentu, dan menunjang pertumbuhan perusahaan.

## **2.14 Pengaruh Perubahan Penjualan terhadap Opini Audit *Going Concern***

Menurut Petronela (2004) dalam Niandari (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang laba tidak akan mengalami kebangkrutan. Pertumbuhan yang positif akan memberikan signal positif atas kelangsungan usaha perusahaan, sedangkan perusahaan yang memiliki perubahan penjualan negatif mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar ke arah kebangkrutan. Kondisi kebangkrutan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan auditor untuk memberikan opini audit *going concern*. Sama halnya dengan penelitian Suharsono (2018) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan *negative growth* mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar ke arah kebangkrutan sehingga perusahaan yang laba tidak akan mengalami kebangkrutan. Karena kebangkrutan merupakan salah satu faktor untuk memberikan opini audit *going concern*.

Penelitian Subarkah dan Maruf (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rahmawati, *et al* (2018) yang menyatakan bahwa

pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan perubahan penjualan berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*. Namun, berbeda dengan penelitian Purba & Nazir (2019), yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*.

Berdasarkan penjelasan mengenai perubahan penjualan dan pengaruhnya terhadap pemberian opini audit *going concern*, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha<sub>5</sub>: Perubahan penjualan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh likuiditas, kinerja keuangan, ukuran perusahaan, *Leverage*, dan perubahan penjualan terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian tersebut antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Miraningtyas dan Yudowati (2019) yang menyatakan bahwa likuiditas dan *disclosure* secara simultan berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit *going concern*. Hasil penelitian Pradika (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian Haryanto dan Sudarno (2019) yang menyatakan bahwa *leverage*, profitabilitas, likuiditas dan rasio pasar secara simultan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Kemudian hasil penelitian Lie, *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* dan rencana manajemen secara simultan berpengaruh terhadap opini audit *going*

*concern*. Hasil penelitian Maruf (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian Pratiwi dan Lim (2018), yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan, *audit tenure*, dan opini audit tahun sebelumnya secara simultan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian Rahmawati, *et al* (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

## 2.15 Model Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

### **Model Penelitian**

